

Majelis Sapujagat Minta BNN Ambil Langkah Tegas Dalam Menurunkan Peredaran Narkotika

Syafruddin Adi - NTB.ASPIRASIWARGA.COM

Nov 13, 2022 - 19:02



Lombok Timur NTB - Persoalan narkoba di negara kesatuan republik indonesia masih menjadi PR yang harus ditangani secara serius.

Kasus demi kasus kerap muncul diseluruh wilayah, baik dari provinsi sampai ke pedesaan.

Lebih khusus di Nusa Tenggara Barat (NTB), peredaran Narkoba belum sepenuhnya bisa ditangani dengan maksimal. Hal itu terbukti masih adanya pelaku baik pengedar ataupun pemakai yang terjaring operasi aparat.

Menyikapi keadaan yang demikian, Majelis Sapujagat Lombok melirik kasus peredaran narkoba yang sudah sangat akrab didengar masyarakat publik.

Melalui Wakil Direktur Abdul Mukmin RY, memadamkan Kasus Narkoba di NTB sudah sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, beberapa pelaku yang terjaring operasi aparat, banyak dari kalangan remaja bawah umur.

"Kami menyayangkan penanganan kasus peredaran Narkoba di NTB, yang masih belum maksimal," ucap Mukmin saat memberikan keterangannya pada hari Ahad (13/11/22).

Mukmin menilai, maraknya kasus ini bukan tidak mungkin menyentuh semua unsur masyarakat, baik masyarakat sivil, ataupun oknum tokoh publik. Sehingga dirinya memandang perlu aparat dalam hal ini pihak BNN mengambil langkah tegas dan terukur untuk dapat menurunkan angka peredaran narkoba di wilayah NTB, dan Indonesia secara umum.

"sangat menyedihkan, kasusu ini banyak melibatkan remaja bawah umur juga, dan bukan tidak mungkin melibatkan oknum tokoh publik juga, BNN harus tegas mengambil sikap," pintanya.

Beberapa isu yang berkembang belakangan ini, terkait isu dugaan kasus narkoba di salah satu instansi, dipandang mukmin sebagai kondisi yang perlu ditanggapi serius.

Dirinya mewakili majlis Sapujagat, meminta publik tidak boleh alergi mendengarkan isu yang demikian. Bukan soal benar dan salah, iya bahkan memandang itu sebagai langkah antisipatif untuk menyelamatkan lembaga negara dari isu yang tidak pantas.

"saya rasa itu wajar, tinggal dilakukan pemeriksaan mendalam, kan bukan soal benar salahnya, tapi perlu diantaisi pasi," katanya.

"Pejabat publik tidak perlu alergi, tanggapilah secara bijak saja, nanti justru dinilai memenangkan ego," imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Wakil Direktur Majelis Sapujagat Abdul Mukmin, meminta kepada pihak Polda NTB untuk melakukan penanganan narkoba secara masif. Penyisiran harus dilakukan pada semua unsur masyarakat, bahkan lembaga, baik lembaga negara ataupun swasta.

Menurutnya, dorongan ini disampaikan Mukmin sebagai bentuk perhatian Majelis terhadap generasi muda NTB, maupun lembaga negara, demi martabat bangsa.

"Kami mendorong Polda NTB untuk melakukan langkah pencegahan secara masif, baik ditengah masyarakat ataupun lembaga negara, demi mempertahankan martabat bangsa," tutupnya. (Adb)